



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALI SYOFII
2. Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN
3. NHK : 452818

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.311.850.000

1. Tanah Seluas 4819 m2 di KAB / KOTA KUDUS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 481.900.000
2. Bangunan Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KUDUS, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
3. Tanah Seluas 1425 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 213.750.000
4. Tanah Seluas 607 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.700.000
5. Tanah Seluas 305 m2 di KAB / KOTA KUDUS, HASIL SENDIRI Rp. 30.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 114.200.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA G Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 50C/SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.700.000
3. MOTOR, HONDA NC11BF1D A/T / SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 298.733.553**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.724.783.553



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.724.783.553

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.